

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TAMBAHAN BIAYA
PRAKTIK JASA *SERVICE* MOTOR
(Studi Kasus Pada Bengkel Sambat Motor Jalan Pangeran
Antasari Kedamaian Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**Muhammad Nuril Fajri
NPM: 1721030305**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TAMBAHAN BIAYA
PRAKTIK JASA *SERVICE* MOTOR
(Studi Kasus Pada Bengkel Sambat Motor Jalan Pangeran
Antasari Kedamaian Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**Muhammad Nuril Fajri
NPM: 1721030305**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**Pembimbing I: Drs. H. Irwantoni, M.Hum
Pembimbing II: Eko Hidayat, S.Sos., M.H**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Sepeda Motor adalah salah satu moda transportasi yang cukup banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia, sepeda motor sudah menjadi alat kebutuhan sehari-hari yang digunakan berbagai aktivitas. Seiring berjalannya waktu sepeda motor yang terus digunakan untuk kendaraan sehari-hari lambat laun akan mengalami penurunan kualitas, sepeda motor yang setiap hari nya dipakai jika tidak diperhatikan dan rutin ganti oli atau *service* pasti akan mengalami kerusakan pada bagian mesin maupun *sparepart* lain nya. Oleh karena itu banyak bengkel motor yang menawarkan jasa untuk memperbaiki mesin atau *sparepart* pada sepeda motor yang rusak tersebut, salah satu nya bengkel Sambat Motor yang terletak di Jl Pangeran Antasari, Mekarsari No.32, Kedamaian, Bandar Lampung. Pada bengkel ini terjadi penambahan biaya *service* secara sepihak yang merugikan salah satu pihak dan penambahan biaya ini terjadi tanpa adanya kesepakatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik penambahan biaya tanpa kesepakatan yang dilakukan pihak bengkel kepada pelanggan atas jasa *service* motor di bengkel Sambat Motor dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik penambahan biaya tanpa kesepakatan atas jasa *service* motor di bengkel Sambat Motor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penambahan biaya tanpa kesepakatan yang dilakukan pihak bengkel kepada Pelanggan di bengkel Sambat Motor Kedamaian Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik penambahan biaya tanpa kesepakatan atas jasa *service* di bengkel Sambat Motor Jalan Pangeran Antasari Kedamaian Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian adalah deskriptif analisis normatif, sumber datanya langsung didapat dari pemilik, karyawan, pelanggan dan bantuan buku-buku yang berkaitan dengan judul. Sampelnya adalah pemilik, karyawan dan pelanggan di bengkel Sambat Motor. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan

cara editing dan *sistemating*. Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik upah mengupah yang terjadi di bengkel Sambat motor terdapat keterpaksaan dari satu pihak karena tidak adanya kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak. Sebelum dilakukannya *service* akan dilakukan proses pengecekan kerusakan namun pada saat motor telah selesai terdapat tambahan biaya dengan berupa perbedaan harga *sparepart*, jasa bubut dan tambahan kerusakan. Tinjauan hukum Islam tentang penambahan biaya tanpa kesepakatan atas jasa *serice* motor dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Adalah tidak sah karena salah satu pihak mengalami kerugian serta adanya keterpaksaan, hal ini sama saja mengambil upah dengan cara yang *batil* yang dilakukan pihak bengkel. Mengambil upah dengan cara *batil* serta adanya keterpaksaan dari salah satu pihak ini tidak sah dan dilarang dalam hukum Islam.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: JL. Letkol H. Endo Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi mahasiswa:

Nama : Muhammad Nuril Fajri
NPM : 1721030305
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah
**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Tambahan Biaya
Praktik Jasa Service Motor (Studi Kasus Pada
Bengkel Sambat Motor Jalan Pangeran Antasari
Kedamaian Bandar Lampung)**

MENYETUJUI

**Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I,

Drs. H. Irwantoni, M.Hum
NIP. 196010211991031003

Pembimbing II,

Eko Hidayat, S.Sos., M.H
NIP. 197512302003121002

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah**

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: JL. Letkol H. Endo Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TAMBAHAN BIAYA PRAKTIK JASA SERVICE MOTOR (Studi Kasus Pada Bengkel Sambat Motor Jalan Pangeran Antasari Kedamaian Bandar Lampung)”** disusun oleh Muhammad Nuril Fajri, NPM. 1721030305, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu, 02 Juni 2021

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.i.

(.....)

Sekretaris : Muslim, M.H.I.

(.....)

Penguji I : Dr. H. A. Kumedhi Ja'far, S.Ag., M.H.

(.....)

Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

(.....)

Penguji III : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. H. Imairuddin, M.H.

NIP. 196210221993031002

MOTTO

.....بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil....”(Q.S An-nisa [4:29])



PERSEMBAHAN

Sembah dan sujudku kepada pemilik kehidupan dan alam semesta Allah SWT.Tuhan seluruh Alam, Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Nya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga, saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang saya cintai.

1. Kedua orang tua saya Bapak Ahmad Misri dan Ibu Indah Lestari yang telah membesarkan, membiayai, mendidik dan mendoakan setiap langkah saya, memberi semangat yang tak ada hentinya mencurahkan kasih sayangnya, memberikan pengorbanan yang selalu menyertai saya dalam menggapai cita-cita. Semoga saya selalu bisa mengukir senyum diwajah kalian termasuk saat saya memakai Toga, Kalian adalah segalanya yang saya miliki di bumi ini. Semoga kalian selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Aaamiiin.
2. Adik-adik tersayang Medina Pertiwi dan Muhammad Ali Syafiq yang telah membangkitkan semangat saya dalam menggapai semua impian. Terimakasih telah menjadi pacuan semangat bagi saya.
3. Almamater Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan Kepada dosen-dosen yang telah memberikan ilmu pendidikan terbaik.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Muhammad Nuril Fajri, lahir di kota Bandar Lampung pada tanggal 25 juli tahun 1999 dari pasangan suami istri Bapak Ahmad Misri dan Ibu Indah Lestari. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis mengawali pendidikannya pada tingkat dasar di SD Negeri 3 Sawah Brebes kota Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 24 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2014, setelah itu melanjutkan pendidikan menengah atas di SMK Negeri 7 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah(Muamalah).

Bandar Lampung, 02 Juni 2021
Penulis,

Muhammad Nuril Fajri
NPM 1721030305

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberi kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Hingga pada hari ini penulis diperkenankan telah menyelesaikan tugas akhir ini. Solawat serta salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau lah suri tauladan yang mulia dan senantiasa kita ikuti sebagai umatnya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafa'at dari beliau kelak. aamiin ya rabbal alamiin.

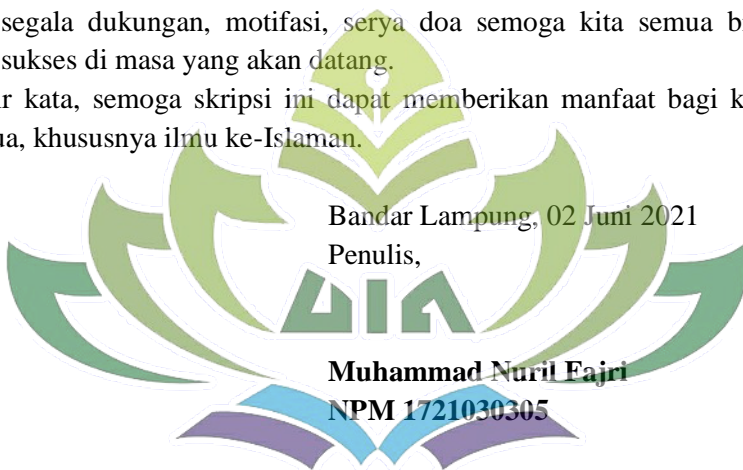
Dengan senantiasa mengharapkan pertolongan, karunia dan pertolongan-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tambahan Biaya Praktik Jasa *Service Motor* (Studi Kasus Pada Bengkel Sambat Motor Jalan Pangeran Antasari Kedamaian Bandar Lampung)".

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini berkat limpahan rahmat Allah SWT kepada penulis dengan perantara beberapa pihak yang telah membantu, untuk itu penulis menyampaikan ungkapan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, dari sosok beliau lah saya belajar untuk selalu ceria dan semangat.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Sebagai ketua Program Studi *Mu'amalah* dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I. Sebagai Sekretaris Program Studi *Mu'amalah* Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum. dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan arahan dan semangat dalam membimbing penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan banyak ilmu, wawasan, serta kesabarannya dalam mendidik penulis selama di bangku perkuliahan. Semoga akan menjadi manfaat dan berkah untuk penulis.
6. Segenap staff perpustakaan Syari'ah maupun perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memfasilitasi untuk melengkapi referensi dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman Muamalah-H 2017 yang telah mengisi cerita perkuliahan, semoga apapun niat baik kita dilancarkan oleh Allah SWT.
8. Sahabat tercinta BIGBOSS *squad* yang telah memberikan warna yang indah di masa perkuliahan, menemani suka dan duka, serta segala dukungan, motifasi, serya doa semoga kita semua bisa sukses di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya ilmu ke-Islaman.



Bandar Lampung, 02 Juni 2021

Penulis,

Muhammad Nuril Fajri

NPM 1721030305

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam Tentang Akad	15
1. Pengertian Akad	15
2. Dasar Hukum Akad	17
3. Rukun dan Syarat Akad	18
4. Macam-Macam Akad	22
5. Asas-Asas Akad	23
6. Berakhirnya Akad	28
B. Hukum Islam Tentang Upan-Mengupah	29
1. Pengertian Upah-Mengupah	29
2. Dasar Hukum Upah-Mengupah	31
3. Rukun dan Syarat Upah-Mengupah.....	36

4. Macam-Macam Upah	40
5. Sifat Upah-Mengupah	41
6. Sistem Pembayaran Upah	42
7. Berakhirnya Upah-Mengupah	44
8. Unsur-Unsur Yang Dapat Merusak Akad Upah-Mengupah.....	45

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1. Profil Bengkel Sambat Motor	47
2. Sejarah Bengkel Sambat Motor	47
3. Visi dan Misi Bengkel Sambat Motor	48
4. Struktur Bengkel Sambat Motor.....	49
5. Jenis-Jenis Layanan Bengkel Sambat Motor	50
B. Praktik Penambahan Biaya Tanpa Kesepakatan Atas Jasa <i>Service</i> Motor Pada Bengkel Sambat Motor.....	51

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Penambahan Biaya Tanpa Kesepakatan Atas Jasa <i>Service</i> Motor Pada Bengkel Sambat Motor.....	57
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penambahan Biaya Tanpa Kesepakatan Atas Jasa <i>Service</i> Motor Pada Bengkel Sambat Motor	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Rekomendasi.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, selain itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Tambahan Biaya Praktik Jasa Service Motor** (Studi Kasus Pada Bengkel Sambat Motor Jalan Pangeran Antasari Kedamaian Bandar Lampung). Untuk itu perlu diuraikan pengertian dan istilah-istilah judul tersebut yaitu sebagai berikut:

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama islam.¹

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.²

Jasa adalah produk ekonomi tidak berwujud yang disediakan oleh seseorang atas permintaan orang lain.

Service motor adalah sering juga disebut dengan istilah perbaikan atau reparasi sepeda motor. Pengertian dari perbaikan itu sendiri adalah usaha untuk mengembalikan kondisi dan fungsi

¹ M.Hasbi Assidqy, *falsaph hukum islam*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002), h. 41

² Praktik” (On-line) tersedia di: <https://kbbi.web.id/praktik> (Diakses pada 02 Oktober 2020)

dari motor yang rusak akibat pemakaian motor tersebut pada kondisi semula.³

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa judul dari skripsi ini adalah tentang pelaksanaan penambahan biaya atas jasa *service* motor di bengkel Sambat Motor Jalan Pangeran Antasari Kedamaian Bandar Lampung yang ditinjau dalam hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Kegiatan *bermuamalah* merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan serta telah diatur dalam kaidah *fiqh-fiqh muamalah*. *Fiqh Muamalah* merupakan aturan-aturan hukum Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi maupun urusan sosial kemasyarakatan. Hal ini menjelaskan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan manusia harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi, sebab segala aktivitas yang dilakukan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat.⁴

Akad *ijarah* dalam hukum Islam didefinisikan sebagai suatu akad atas beban yang objeknya adalah manfaat dan jasa. Akad *ijarah* ini meliputi dua macam, yaitu: pertama, berupa sewa-menyewa yang biasanya disebut sebagai *ijarah al-manafi'*, seperti sewa-menyewa rumah, dan kedua berupa perjanjian kerja yang dikenal dengan istilah *ijarah al-'amal*. Menurut *Wahbah azZuhaili* sebagaimana dikutip oleh Syamsul Anwar, para ulama fiqh mendefinisikan *ijarah al-'amal* sebagai suatu akad yang objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan tertentu seperti

³ Arif, *Farmasetika*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), h.39.

⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, (Jakarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya), 2010, h.15

membangun, menjahit dan sebagainya. *Ijarah* jenis inilah yang merupakan sumber perikatan kerja (*ijarah al-'amal*).⁵

Dalam Islam, upah dikenal dengan *ujrah*. Upah itu sendiri merupakan salah satu bentuk pemberian yang terdapat dalam suatu akad kerjasama antara seseorang dengan orang lainya, yang termasuk dalam kategori akad yang dikenal dengan istilah *Al-ijarah*. Oleh karena itu untuk dalam melakukan akad tersebut harus memenuhi rukun dan syarat yang ada di dalam *ijarah* itu sendiri.⁶

Dalam suatu akad *ijarah* upah mengupah dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu Harus adanya keridhaan dari *aqid* (orang yang melakukan akad), dalam melakukan akad tidak boleh adanya unsur penipuan. *Mu'qud'allaih* (barang yang menjadi objek akad) harus memiliki manfaat dengan jelas serta harus dapat memenuhi Syara'. *Ujrah* (upah) harus jelas jenis, macam, sifat dan ukurannya. Dan *nafs al-'aqad* (zat akad).

Karena *lafadz ijarah* merupakan suatu akad yang diimbangi dengan imbalan, maka kedua belah pihak yang mengadakan akad harus menentukan besarnya imbalan, menurut perkataan dan kerelaan mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-nisa 4:29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.54-55.

⁶ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, Terj. Redaksi Al-Azhar Press,(Bogor:Al-Azhar Press,2010),h.110

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu".⁷

Lafadz *bathil* dalam ayat di atas memiliki makna sebagai suatu nama untuk hal-hal yang tidak dihalalkan oleh syariat. Bisa berupa riba, *ghashab*, mencuri, berkhianat, kesaksian palsu, mendapatkan uang dengan sumpah palsu, bahkan meningkari kebenaran. Janganlah mengambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli, (jangan pula) dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi *dibolehkan* untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor syari'.⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat islam untuk mencari rejeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan jalan yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan antara kedua belah pihak. Akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.⁹

Sepeda Motor adalah salah satu moda transportasi yang cukup banyak digunakan oleh masyarakat di indonesia, sepeda motor sudah menjadi alat kebutuhan sehari hari yang digunakan berbagai aktifitas, mulai dari mengantar anak sekolah, digunakan untuk bekerja ojek online, digunakan untuk pergi ke kantor, pergi berangkat kuliah, dan aktifitas lain yang berhubungan dengan sepeda motor. Selain itu motor juga dapat digunakan untuk berpergian jarak jauh, belum lagi komunitas-komunitas motor

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Diponegoro, 2006), h. 65.

⁸ Ahmad Azhar Basyir. (2009). *Asas- Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*,. Yogyakarta: UII Press, h.78

⁹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Grafindo Persada Pertama, 2007), h. 232-233.

untuk setiap wilayah yang terus semakin berkembang di Indonesia. Motor menjadi salah satu alat transportasi yang paling banyak digunakan karena lebih praktis dan juga dari faktor harga lebih terjangkau dibandingkan kendaraan roda empat atau mobil.

Seiring berjalannya waktu sepeda motor yang terus digunakan untuk kendaraan sehari-hari lambat laun akan mengalami penurunan kualitas, sepeda motor yang setiap hari nya dipakai jika tidak diperhatikan dan rutin ganti oli atau *service* pasti akan mengalami kerusakan pada bagian mesin maupun *sparepart* lain nya. Oleh karna itu banyak bengkel motor yang menawarkan jasa untuk memperbaiki mesin atau *sparepart* pada sepeda motor yang sudah *usang* tersebut, salah satu nya bengkel Sambat Motor yang terletak di Jl Pangeran Antasari, Mekarsari No.32, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Dalam menangani sepeda motor yang mengalami kendala, bengkel Sambat Motor mematok harga yang bermacam-macam sesuai dengan kendala pada sepeda motor tersebut.

Karena kerusakan yang beragam ini mulai dari ganti oli, *service* ringan, sampai turun mesin(*overhaul*) bengkel Sambat motor sanggup melayani. Jika terjadi kerusakan yang parah biasanya sepeda motor akan diperbaiki dengan jangka waktu satu sampai tiga hari di bengkel karena harus terlebih dahulu membeli alat dan *sparepart* yang akan digunakan. sebelum memulai memperbaiki sepeda motor biasanya pihak bengkel akan mencari tahu apa saja kerusakan pada sepeda motor tersebut dan menghitung jumlah biaya yang harus dikeluarkan, jika sudah diketahui bagian-bagian mana saja yang harus diperbaiki dan diganti pihak bengkel akan memberi tahu kepada pelanggan terhadap apa saja kerusakan dan jumlah biaya yang harus dikeluarkan pelanggan tersebut.

Jika pelanggan ingin melanjutkan *service* dan setuju terhadap biaya yang akan di keluarkan maka pelanggan harus terlebih dahulu melakukan pembayaran uang muka dengan jumlah yang telah ditetapkan pemilik bengkel tersebut, lalu

sepeda motor tersebut akan dititipkan kepada bengkel untuk diperbaiki dengan jangka waktu satu sampai tiga hari.

Pada praktiknya, setelah motor selesai diperbaiki dan siap untuk diambil oleh pelanggan ternyata ada tambahan biaya dikarenakan perbedaan pada harga *sparepart*, jasa bubut dan adanya kerusakan dari komponen mesin lain yang tidak di konfirmasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, pemilik motor harus membayar biaya tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dengan bengkel motor tersebut.¹⁰

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang penambahan biaya atas jasa *service* motor yang terjadi tanpa kesepakatan dengan mengadakan penelitian dalam skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa *Service* Motor".

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mencari suatu hal yang baru dengan terlebih dahulu membuat atau menetapkan fokus penelitian pada objek yang akan diteliti. Penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan untuk meneliti praktik penambahan biaya tanpa kesepakatan atas jasa *service* pada bengkel sambat motor.

Subfokus pada penelitian ini adalah tambahan biaya atas jasa *service* motor yang dilakukan tanpa kesepakatan antara pihak bengkel dan pelanggan di bengkel Sambat Motor Jalan Pangeran Antasari Kedamaian Bandar Lampung yang ditinjau dalam pandangan hukum islam.

¹⁰ Observasi, di Bengkel Sambat Motor Jl Pangeran Antasari Kedamaian Bandar Lampung, Tanggal 13 Oktober 2020

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Penambahan Biaya Tanpa Kesepakatan Atas Jasa *Service* Motor di Bengkel Sambat Motor?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penambahan Biaya Tanpa Kesepakatan Atas Jasa *Service* Motor di Bengkel Sambat Motor?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Praktik Yang Dilakukan Antara Pihak Bengkel Dengan Pelanggan di Bengkel Sambat Motor Jalan Pangeran Antasari Kedamaian Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penambahan Biaya Tanpa Kesepakatan Atas Jasa *Service* di Bengkel Sambat Motor Jalan Pangeran Antasari Kedamaian Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara akademik dapat menambah dan memperkaya wacana ilmu pengetahuan.
2. Menambah bahan pustaka bagi UIN Raden Intan Lampung khususnya Fakultas Syari'ah prodi Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap penambahan upah Jasa *service* motor yang dilakukan tanpa kesepakatan .
3. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran upah di bengkel Sambat Motor Jalan Pangeran Antasari Kedamaian Bandar lampung.

4. Memberikan informasi yang ilmiah mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik jasa *service* motor bagi para peneliti yang hendak mengkaji kembali hasil penelitian ini.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Setelah ditelusuri melalui kajian pustaka, sebenarnya sudah ada beberapa skripsi yang memiliki tema yang hampir sama diantaranya:

1. Penelitian skripsi dari Wiken Widya Ningrum. Tahun 2019. UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad di Awal”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik upah mengupah tanpa akad di awal yang dilakukan pihak toko tersebut dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang sistem upahmengupah tanpa akad di awal yang terjadi pada toko tersebut. Sedangkan jenis penlitian yaitu lapangan (*field research*) dan metode yang dipakai yaitu metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik upah-mengupah tanpa akad di awal tersebut adalah haram dan dilarang dalam hukum islam, sebab menarik keuntungan yang tidak disetujui dan tidak diketahui oleh salah satu pihak bahwa adanya biaya tambahan yang diharuskan untuk dibayar. Hal ini yang membuat sebagian konsumen tidak menyetujui terhadap prosedur yang ditetapkan sebab apapun biaya yang akan dikeluarkan akan lebih baik jika kedua pihak sama-sama mengetahui dan menyetujui secara bersamaan, hal ini untuk menghindari pemaksaan terhadap konsumen dan juga mempererat tali silahturahmi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wiken Widya Ningrum terdapat perbedaan objek dan pokok masalah. Skripsi di atas membahas tentang upah-mengupah tanpa akad di awal, Sedangkan skripsi yang penulis lakukan yaitu penambahan biaya yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu antara pihak bengkel dan pelanggan.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rohmat Hidayat pada tahun 2020 UIN Raden Intan Lampung yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Kerja Memanen Padi Dengan Sistem *Makes*" Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah praktik dan pandangan hukum Islam terhadap praktik pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes*. Kemudian untuk jenis penelitian ini adalah termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*), sedangkan untuk sifat penelitian, penelitian ini adalah bersifat deskriptif normatif. Sedangkan dalam metode penelitian adalah metode kualitatif dan penelitian lapangan.

Adapun hasil penelitian yaitu terdapat perbedaan yaitu upah ditetapkan dan dibayarkan di awal dengan menebak hasil panen yang didasarkan pada pentaksiran seberapa luas lahan pertanian dan terdapat sebuah upaya yang dilakukan oleh pemborong untuk mencari keuntungan dengan cara melebihkan jumlah taksiran dari biasanya. Berdasarkan beberapa permasalahan yang terjadi dalam praktik tersebut dapat merusak salah satu rukun atau syarat sah dari akad *ijarah*, karena di dalam praktiknya terdapat unsur kemudharatan berupa *ke-ghararan* atau *jahalah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Rohmat Hidayat membahas tentang perbedaan upah yang ditetapkan dan dibayarkan diawal dengan menebak hasil panen oleh pemborong untuk mencari keuntungan, Sedangkan skripsi yang penulis lakukan yaitu membahas tentang penambahan biaya yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu antara pihak bengkel dan pelanggan.

3. Penelitian skripsi dari Kurniawati Safitri. Tahun 2019 IAIN Ponorogo yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jasa *service* mobil”. Penelitian ini guna untuk mengetahui akad yang dilakukan serta bagaimana pandangan hukum islam terhadap apa yang dilakukan oleh pelanggan. Metode yang digunakan adalah survey yang bersifat deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, akad antara pemilik bengkel dengan pelanggan sudah sesuai dengan hukum islam. Wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan yang tidak memberikan upahnya kepada pihak bengkel atas jasa terhadap apa yang telah dikerjakannya sangat berlawanan dengan hukum Islam karena dari pelanggan tidak memberikan upahnya atas penggantian jasa yang dilakukan.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Kurniawati Safitri yaitu membahas tentang wanprestasi yang dilakukan pelanggan dan tidak memberikan upah kepada pihak bengkel mobil. Sedangkan skripsi yang penulis lakukan yaitu penambahan biaya yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu antara pihak bengkel dan pelanggan.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi serta mencakup alat dan prosedur penelitian.¹¹ Berikut akan dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang berdasarkan kenyataan di lapangan dalam keadaan yang sebenarnya. Selain

¹¹ Newman, Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, (Jakarta, 2013), h. 29

penelitian lapangan, penelitian ini menggunakan penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan dari referensi buku, jurnal media elektronik, internet, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.¹²

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis normatif yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan pada bengkel Sambat motor Jalan Pangeran Antasari, Mekarsari No 32, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung.

3. Sumber data

- a. **Data Primer**, Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dilapangan dari sumber aslinya berupa wawancara serta hasil observasi dari pemilik dan mekanik bengkel Sambat motor yang merupakan penyedia jasa *service* motor serta pelanggan sebagai pengguna jasa.
- b. **Data Sekunder**, Sumber data penelitian yang diperoleh peneliti melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, serta arsip-arsip pada bengkel Sambat Motor.

4. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari beberapa individu yang karakteristiknya akan diteliti dan akan ditarik kesimpulannya. Adapun Populasi dari penelitian ini adalah 1 orang pemilik bengkel, 2 orang mekanik bengkel, dan 103 orang pelanggan bengkel dalam kurun waktu 23

¹² Jamal Ma'mun Asmani, *Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Pendidikan* (Yogyakarta: Diva Press, 2011), h. 40.

februari sampai 27 maret 2021 sebagai data yang dijadikan populasi.¹³

Sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Jika populasinya lebih dari 100, maka sampelnya mengambil 10%-15% dari populasi.¹⁴ Sampel pada penelitian ini yaitu 11 orang. Terdiri dari 1 orang pemilik, 2 orang mekanik dan 8 orang pelanggan bengkel Sambat.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.
- b. Wawancara (*Interview*) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan kedua belah pihak baik peneliti maupun narasumber yang terpercaya dengan mengajukan langsung pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian.
- c. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan tujuan untuk memperoleh kelengkapan data yang diperoleh melalui dokumentasi ataupun catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, langkah selanjutnya adalah mengolah data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. *Editing*, adalah pengoreksian yang dilakukan yang bertujuan untuk mengecek data yang terkumpul sudah benar dan lengkap serta sesuai dengan permasalahan.

¹³ Observasi, di Bengkel Sambat Motor Jl Pangeran Antasari Kedamaian Bandar Lampung, Tanggal 13 Oktober 2020

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R D*(Bandung: Alfabeta , 2018) h. 58

- b. *Sistematizing*, adalah menetapkan data berdasarkan kerangka sistematika bahasa dengan fokus pada urutan masalah. Data dikelompokkan secara sistematis menurut klasifikasi dan urutan masalah.

7. Metode analisis data

Analisis data adalah proses menganalisa terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui perangkat metodologi tertentu.¹⁵ Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan berdasarkan dari data yang terkumpul dan menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara bertahap yang disesuaikan dengan kajian penelitian praktik jasa *service* motor dalam tinjauan hukum islam dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

Metode berfikir deduktif adalah metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembaca serta mendapatkan gambaran umum dari penulisan ini, penulis akan membagi pembahasan menjadi lima bab, dimana setiap sub-sub bab masing-masing yaitu:

BAB I Pada Bab ini menguraikan penerapan proposal yang berisi tentang pendahuluan, akan penulis deskripsikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Membahas tentang landasan teori, yaitu hukum Islam tentang akad yang meliputi pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, asas-asas akad,

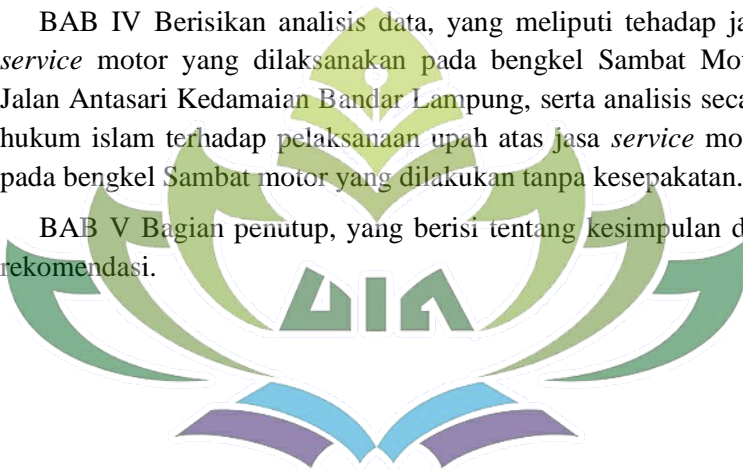
¹⁵ Buhran Bungain, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h.196.

berakhirnya akad. Serta hukum Islam tentang *ijarah* yang meliputi pengertian *ijarah*/upah, dasar hukum *ijarah*/upah, rukun dan syarat *ijarah*/upah, macam-macam *ijarah*/upah, sifat akad *ijarah*/upah, serta sistem pembayaran *ujrah*/upah, Berakhirnya *ijarah*/upah dan pembayaran upah jasa terhadap pekerja tanpa kesepakatan.

BAB III Tentang deskripsi objek penelitian, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian dan praktik penambahan biaya tanpa kesepakatan atas jasa *service* motor yang dilaksanakan di bengkel Sambat Motor Jalan Pangeran Antasari Kedamaian Bandar Lampung.

BAB IV Berisikan analisis data, yang meliputi terhadap jasa *service* motor yang dilaksanakan pada bengkel Sambat Motor Jalan Antasari Kedamaian Bandar Lampung, serta analisis secara hukum islam terhadap pelaksanaan upah atas jasa *service* motor pada bengkel Sambat motor yang dilakukan tanpa kesepakatan.

BAB V Bagian penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam Tentang Akad

1. Pengertian Akad

Dalam bahasa Arab, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan janji atau perjanjian, yaitu kata *wa'ad* (*al-wa'du*), akad (*al-'aqdu*), *'ahd* (*'al-ahdu*), dan *iltizam*. Dalam bahasa Indonesia, juga terdapat kata janji, perjanjian, perikatan, persetujuan, dan lainnya. Secara umum kata-kata tersebut sering dianggap sama atau mempunyai pengertian yang serupa. Akan tetapi, dalam kajian hukum, istilah tersebut memiliki arti dan pemahaman yang berbeda. Lafadz akad berasal dari lafadz Arab *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan *al-ittifaq*.¹⁶

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Ali Imran 3:76


بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”¹⁷

Istilah *Ahdu* dalam Al-Qur'an mengacu kepada pertanyaan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut.¹⁸ Seperti yang dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Medika Pratama,2014), h.97

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Diponegoro, 2006), h.46

¹⁸ Tim Tasbih Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: Versia Yogya Grafika, 1995), h. 23.

76 diatas, bahwa janji tetap mengikat pada orang yang membuatnya.¹⁹

Dalam terminologi hukum Islam akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Yang dimaksud dengan ijab adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima dan meyetujui pernyataan ijab.²⁰

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyari'atkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang dikaitkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.²¹

Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyari'atkan dan berpengaruh dalam sesuatu.²² Istilah "perjanjian" dalam hukum indonesia di sebut "akad" dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang

¹⁹ Sohari Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: PT Raja Grafindo Persada, 1979), h.42

²⁰ Gufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual. Ed 1, Cet 1*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), h.76

²¹ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h.26

²² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h.35

berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).

2. Dasar Hukum Akad

a. Q.S Al-Maidah 5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ
الَّتِي كُنْتُمْ عَلَىٰهَا مِن قَبْلُ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ
حَافِظُونَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.)"*²³

b. Q.S Ali 'Imran 3:76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

*"(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji(yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."*²⁴

c. Q.S Al-Baqarah 2:198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ

*"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu,..."*²⁵

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,....h.84

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,....h.46

Dari ketiga ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT. memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah, maupun janji yang dibuat di antara sesama manusia, seperti yang bertalian dengan perkawinan, perdagangan dan sebagainya.

d. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمَ خَانَ (رواه البخارو مسلم)²⁶

“Dari Abdillah bin Amr, Nabi Muhammad SAW bersabda, Tanda orang munafik itu ada tiga: yaitu jika berbicara berdusta, jika berjanji maka tidak menepati, dan jika diberi amanah, dia berkhianat.” (HR. Bukhari no. 33 dan Muslim no. 59).

Hadits ini menjelaskan jika seseorang berjanji dan tidak menepati janjinya, maka dia termasuk orang yang munafik. Maka dari itu kita wajib menepati janji yang kita buat.

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Rukun akad adalah kata *mufrad* dari kata jama’ “*arkaa*” artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sah (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk dalam pekerjaan itu.²⁷

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..... h.24

²⁶ Ahmad Ibnu Hanbal Abu ‘Abdullah Asy-Asyaibani , *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Jilid 2 h. 189.

²⁷ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Cetakan Ke III, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), h.300.

Adapun Ulama Hanafiyah mengartikan rukun dengan sesuatu yang tergantung atasnya sesuatu yang lain dan ia berada dalam esensi sesuatu tersebut, sedangkan menurut Jumhur Ulama Fiqh, rukun adalah sesuatu yang lain atasnya, tetapi tidak harus berada pada esensi sesuatu tersebut.²⁸

Oleh karena itu yang dimaksud dengan rukun ialah suatu unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan yang lain, dalam hal ini adalah pekerjaan jual beli, upah mengupah atau perdagangan.

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja di buat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan iltizam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:

1) *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *aqid*,²⁹ antara lain:

- a) *Ahliyah*, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal disini ialah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan ucapan orang-orang normal. Sedangkan mumayyiz disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.

²⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta : Logos Publishing House, 1996), h. 264.

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.68

- b) *Wilayah*, *wilayah* bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.
- 2) *Mau'quh'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
- 3) *Maudhu' al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) *Sighat al' aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sight al-aqd*³⁰ ialah:

- a) *Sight al-'aqd* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak banyak memiliki banyak pengertian.
- b) Harus sesuai antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz.
- c) Mengambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain

³⁰ Sohari Sahari, *Fiqh Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.43

karena dalam tijarah harus saling ridha.

b. Syarat Akad

Berdasarkan unsur akad yang telah dibahas, ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan, dan syarat keharusan (*luzum*).

1) Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian:

- a) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- b) Khusus, yakni syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak diisyaratkan pada bagian lainnya.

2) Syarat Sah Akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemadharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak (*fasid*).

3) Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara', adapun

kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam *berthasaruf* sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang). Dalam hal ini diisyaratkan antara lain:

- a) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
 - b) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.
- 4) Syarat kepastian hukum (*luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Diantaranya syarat *luzum* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar aib, dan lain-lain. Jika *luzum* tampak, maka akad batal atau dikembalikan.³¹

4. Macam-Macam Akad

Para Ulama mengemukakan bahwa akad itu bisa di bagi dari berbagai segi keabsahannya. Menurut syara' dapat dibagi menjadi:³²

- a. Akad sah yaitu akad yang memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari rukun dan syarat ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad sah ini menjadi dua macam yaitu:

- 1) Akad *Nafis* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

³¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 64-66.

³² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*,..... h.108

- 2) Akad *Mauquf* yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama fiqih membagimenjadi dua macam:

- 3) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.
 - 4) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad *al- wakalah* (perwakilan), *al- 'ariyah* (pinjam- meminjam), *al- wadi 'ah* (barang titipan).
- b. Akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama hanafiyah membagi dua macam yaitu akad yang fasad dan akad yang batil.
- Akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara'. Sedangkan akad fasad adalah akad pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.

5. Asas-Asas Akad

Hukum Perdata Islam telah menetapkan beberapa asas akad yang berpengaruh pada pelaksanaan akad oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan akad, maka akan berakibat batal atau tidak sahnya perjanjian yang dibuat.³³ Asas-asas tersebut diantaranya adalah:

³³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.75

a. Asas *Ibahah* (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas *Ibahah* adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalah. Asas ini dirumuskan dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أُؤْيَدُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”.³⁴

Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.³⁵

b. Asas kebebasan berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*)

Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objeknya maupun syaratsyaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling mendzalimi antara sesama manusia melalui perjanjian yang dibuatnya. Asas ini dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikrah*), tekanan, penipuan, dari pihak manapun. Asas kebebasan berakad ini merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas terhadap asas *ibahah* dalam muamalah.³⁶

³⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007),

³⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*,..... h. 83-84.

³⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*,..... h. 84.

c. Asas konsensualisme (*Mabda' ar-Radha' iyyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.³⁷

Para ahli hukum Islam biasanya menyimpulkan asas konsensualisme dari dalil-dalil hukum berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S An-nisa (4:29))³⁸

d. Asas kerelaan (*ar-Ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa semua akad yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan pada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Hukum Islam mempunyai pandangan yang berbeda dengan hukum perdata umum dalam hal kerelaan membuat kontrak. Dalam hukum perdata umum, kontrak dianggap sah apabila dibuat atas dasar sukarela, meskipun tidak memperhatikan nilai-nilai agama.

³⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*,..... h.78

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,....h. 65

Adapun dalam hukum Islam nilai-nilai agama sangat diperhatikan. Oleh karena itu, kemerdekaan seseorang membuat kontrak tidak boleh menyimpang dari ketentuan agama Islam, meskipun orang yang membuat kontrak itu telah menyatakan kerelaannya. Dengan kata lain, hukum Islam pada dasarnya memberi kebebasan orang yang membuat kontrak sesuai dengan keinginannya, tapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama, untuk menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya.

- e. Asas keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadlah*)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko.³⁹

Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercerminkan dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat persentase tertentu sekalipun saat dananya mengalami kembalian negatif.

- f. Asas persamaan dan kesetaraan (*al-Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan akad perjanjian karena erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam akad yang dibuatnya.

³⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*,..... h. 90.

g. Asas keadilan (*al- 'Adalah*)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu akad perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling mendzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam akad tersebut.⁴⁰

h. Asas kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*musyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.⁴¹

i. Asas amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian.

j. Asas tertulis(*al-Kitabah*)

Asas lain dalam melakukan akad adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi

⁴⁰ Abdul Manan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 77

⁴¹ Abdul Manan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*,..... h. 340

permasalahan di kemudian hari.

k. Asas ilahiah

Asas ilahiah diperlukan karena setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT.

6. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad dapat disebabkan karena berakhirnya masa akad, pembatalan, pemutusan akad, dan kematian. Berikut penjelasan dari masing-masing tersebut:⁴²

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akat bisa dianggap berakhir jika: (a) jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi; (b) berlakunya *khiyar syarat*, *khiar aib*, atau *khiyar rukyah*, (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan (d) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini para Ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa- menyewa.

⁴² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.35

B. Hukum Islam Tentang Upah-Mengupah

1. Pengertian Upah-Mengupah

Upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan *ajrun/ajran* yang berarti memberi hadiah atau upah. Kata *ajran* mengandung dua arti, yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala. Sedangkan upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan.⁴³ Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.⁴⁴

Upah (*Ujrah*) dalam konteks *Ijarah* adalah pemilikan jasa dari seseorang yang menyewa (*mu'ajir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajir*. Dengan demikian *ijarah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula adalah pemilikan jasa dari seseorang yang menyewa (*mu'ajir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajir*. Dengan demikian *ijarah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.⁴⁵

Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan yang berhubungan dengan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia, Islam mewajibkan setiap muslim khususnya yang memiliki kewajiban untuk bekerja merupakan salah satu sebab pokok

⁴³Berbagi Ilmu” (On-line). Tersedia di: <https://rianamuslikhah.blogspot.com/2015/02/makalah-upah-dalam-islam.html/> Diakses pada 10 Januari 2021.

⁴⁴ Al-Faruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2 (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989), h. 361

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 228.

yang memungkinkan manusia memiliki harta dan kekayaan, serta mencari karunia Allah SWT. Dengan demikian dalam teori ekonomi membedakan istilah upah dan gaji dilihat dari sisi jenis pekerjaan dan teknis pembayarannya. Dalam upah lebih kepada pekerjaan kasar yang mengandalkan fisik dengan pembayaran berdasarkan unit kerja yang diselesaikannya. Sedangkan gaji lebih kepada pekerjaan yang menggunakan keahlian tertentu yang pembayarannya tetapkan berdasarkan waktu tertentu.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bias hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, dan manusia memiliki kebutuhan untuk melakukan suatu kegiatan. Salah satunya adalah dengan melakukan sesuatu untuk mewujudkan sesuatu yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Orang lain dapat melakukan sesuatu dengan melibatkan atau memfungsikan orang lain dengan ketentuan dan kegiatan, dengan konsekuensi harus memberikan imbalan yang akan menimbulkan bentuk kegiatan manusia yaitu adanya transaksi dalam suatu pekerjaan yaitu upah mengupah atas jerih payah orang lain tersebut jika tidak, berarti termasuk orang-orang yang zalim. Setiap manusia akan terdorong untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.⁴⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balasjasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁴⁷ Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*,..... h. 77.

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2011), Cet-IV

pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁴⁸

Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi.

Seorang pekerja berhak menerima upahnya ketika sudah mengerjakan tugas-tugasnya, maka jika terjadi penunggakan gaji pekerja, hal tersebut selain melanggar kontrak kerja juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain ketepatan pengupahan, keadilan juga dilihat dari proporsionalnya tingkat pekerjaan dengan jumlah upah yang diterimanya.⁴⁹

2. Dasar Hukum Upah-Mengupah

Sumber hukum dalam Islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan Al-Qur'an, Sunah Nabi, dan Ijma.

a. Q.S At-Thalaq 65:6 :

أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ

تَعَاَسَرْتُمْ فَسَتَرْضَعْنَ لَهُنَّ أُخْرَى ۖ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)

⁴⁸ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016) h. 141.

⁴⁹ Pengusaha Muslim, On-line” tersedia di: <https://pengusahamuslim.com/3577-tenaga-kerja-dan-upah-dalam-1823.html>, Diakses pada 11 Januari 2021.

*mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*⁵⁰

Ayat ini menjelaskan bahwasanya dalam pemberian upah terhadap suatu pekerjaan hendaklah dimusyawarahkan dan di sepakati terlebih dahulu antara kedua belah pihak, agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan terhadap pihak yang lain.

b. Q.S Al-Baqarah ayat 2:233

.....فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْعَرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

*".....Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*⁵¹

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...h. 446

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...h. 29

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.⁵²

c. Q.S Al-Qasas 28:26-27:



"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

"Berkatalah dia (Sya'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja

⁵² Ahmad Musthofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Cet I, (Semarang: CV Toha Putra, 1984), h. 350

denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".⁵³

Yang dimaksud dalam surat *al-Qashash* ayat diatas adalah membahas tentang konsep pengupahan dalam Islam. Selain itu, ayat tersebut juga menjelaskan bahwa pengupahan dalam Islam menekankan pada dua aspek sekaligus yaitu aspek dunia dan akhirat, adapun maksudnya adalah agar manusia tidak terlalu mengejar urusan dunia maupun urusan akhirat, melainkan harus seimbang antara dunia dan akhirat.

Berdasarkan ketiga ayat yang telah disebutkan di atas, menjelaskan tentang pemberian upah terhadap para pekerja yang melakukan pekerjaan kepada yang memerlukan keahlian mereka. Artinya perintah pemberian upah tersebut perintah langsung dari Allah yang telah dituliskan dalam Al-Qur'an dan ini menjadi dasar bahwa dalam ketentuan *ijarah* telah disyari'atkan baik dari segi upah yang menjadi salah satu syarat sewa menyewa, maupun dari segi objek sewa menyewa yang dapat berupa barang dan pekerjaan atau jasa inilah yang menjadi dasar hukum di perbolehkan nya *ijarah* dalam kehidupan.

- d. Hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Umar:

عَنْ بَنِي عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُعْطُوا لَا حِيزَ أَجْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)⁵⁴

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...h. 310

⁵⁴ Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, (Bandung: Sygma Publishing, 2011). Hadist No.1120, h.76

“Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda berikanlah kepada tenaga itu upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah).

Hadist di atas menjadi dasar untuk memberikan upah kepada pekerja setelah terlaksana pekerjaannya. Hal tersebut dianggap oleh Rasulullah sebagai hal yang paling baik, karena menghindarkan dari terjadinya kerugian pada salah satu pihak⁵⁵

e. *Ijma*

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijarah* sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat dari akad *ijarah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap sesuatu hal yang pasti.⁵⁶ Selain itu, dalam buku karangan Hendi Suhendi yang dikutip dari fikih as-Sunnah, bahwa landasan *ijma* ialah semua umat bersepakat, serta tidak ada yang membantah kesepakatan terkait persoalan *ijma* ini. Sekalipun ada, hanya beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat. Akan tetapi, hal itu tidak di anggap merusak hukum kebolehan atau pembolehan tentang akad *ijarah* yaitu *ujrah* atau pengupahan (upah).⁵⁷

Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa-menyewa itu dibolehkan oleh seluruh fuqaha negri besar dan fuqaha masa pertama”.⁵⁸ *Al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah

⁵⁵ Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekan Baru: Suska Press, 2008), h. 162.

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.386

⁵⁷ Ria Astuti, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS)*”. (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018), h. 27-28.

⁵⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid juz 2*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga), h.165

sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁵⁹

3. Rukun dan Syarat Upah-Mengupah

a. Rukun Upah-Mengupah

Secara etimologi Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.⁶⁰ Menurut hanafiyah, rukun dan syarat hanya ada satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Menurut jumhur ulama bahwa rukun *ujrah* ada 4 (empat), yaitu :

1) *Muta'aqiadin* (dua pihak yang bertransaksi).⁶¹

Dua pihak yang bertransaksi disebut *mu'jir* dan *musta'jir*. *mu'jir* adalah orang yang menggunakan jasa atau tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. *Musta'jir* adalah orang yang menyumbangkan tenaganya. *Mu'jir* dan *musta'jir* adalah orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah satu seorang itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik dan buruk. Maka akad menjadi tidak sah.

2) *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*

Sighat adalah transaksi *ijarah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'aqiadin*, yakni berupa lafal atau sesuatu yang meyakini nya, seperti lafal mengupah seseorang. Upah

⁵⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 117

⁶⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 966

⁶¹ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, Dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Riyadh: Madrul Wathan Lin-Nasyr, 2004), h. 317.

mengupah ini berarti *ijarah* kemudian orang yang diupah menyetujuinya. Jika *Muta'aqadin* mengerti lafal *sighat*, maka *ijarah* telah sah apapun lafal yang digunakan karena syari" tidak membatasi lafal transaksi, tetapi hanya menyebutkan secara umum.

3) *Al-ujrah* (upah)

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh pengupah sebagai kompensasi dari manfaat yang diterimanya. Alat tukar yang dapat digunakan dalam jual beli juga dapat digunakan dalam *ijarah*. Seperti dirham, barang-barang yang dukaar dan ditimbang, dan barang-barang yang dapat dhitung. Sehingga hal itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukuranya.

4) *Ma'qud'alaih* (manfaat yang ditransaksikan).

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah. Cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan.⁶²

b. Syarat *Ujrah*

Syarat adalah ketentuan (peraturan/petunjuk) yang harus dilakukan dan harus diindahkan. Menurut Satria Effendi M.Zein bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain.⁶³

Syarat *ujrah* terdiri dari 4 (empat), sebagaimana syarat jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat *sah*, syarat *lazim*.

⁶² Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, Dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*,.....h.170

⁶³ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqih*, Jilid 1,(Yogyakarta:PT Dana Bhakti Wakaf,1995), h. 34

1) Syarat terjadinya akad

Syarat *in 'inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan *aqid*, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jualbeli, menurut ulama Hnafiyah, '*aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun) serta tidak isyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.⁶⁴ Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat ijarah, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung pada keridaan walinya.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang berakad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan Mumayyiz belum dikategorikan ahli akad.

2) Syarat Pelaksanaan (*An-nafadz*)

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliyah*). Dengan demikian *ijarah al-fudhul* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.

3) Syarat Sah *Ujrah* (Upah-mengupah)

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang berakad), *mu'qud 'allaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-'aqad*), yaitu :

a) Aqid (orang yang melakukan akad)

Dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan baik *mu'jir* dan *musta'jir*. *Ma'qud 'allaih*

⁶⁴ Allaudin al-kasanih, *badai' ash-Shanas fi taribAsy-syarai*, juz VI, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1971), h. 176

bermanfaat dengan jelas. Adanya kejelasan pada *ma'qud 'alaih* (barang) menghilangkan pertentangan diantara *aqid*. Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) adalah dengan jelas manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atas jasa seseorang ketika transaksi dilakukan.

Ma'qud alaih harus dapat memenuhi Syara'. Dipandang tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid, sebab diharamkan syara'. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'. Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara'.

b) Keridhaan pihak yang berakad

Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini tidaklah boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak lain.

c) *Ujrah*(upah), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.

d) Syarat yang kembali pada rukun akad

Akad diisyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad.

e) Syarat kelaziman *ujrah* terdiri atas : *Ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad) terhindar dari cacat dan Tidak ada unsur yang dapat membatalkan akad, unsur yang dimaksud adalah

sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadharatan bagi yang melakukan akad.⁶⁵

4. Macam-Macam Upah

Dalam ilmu ekonomi ataupun fikih muamalah, dikenal beberapa jenis pengupahan. Adapun macam-macam pengupahan adalah sebagai berikut:

a. Upah Borongan

Upah borongan merupakan jenis pengupahan yang sedang atau akan dikerjakan. Upah borongan juga tidak tergantung pada waktu atau berapa lama seseorang menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dalam fikih muamalah biasanya dikenal dengan akad *ijarah* ataupun *ju'alah* yang diambil dari kata *ja'ala* – *yaj'alu* – *ja'alah* yang bermakna mengadakan atau menjadikan. Sedangkan secara istilah, menurut empat Imami Mazhab yang dimaksud dengan *ju'alah* adalah sebuah imbalan atau upah terhadap suatu manfaat yang diberikan kepada seseorang berdasarkan hasil. Contohnya ketika seseorang bekerja untuk membuat sumur, maka upah akan diberikan setelah ditemukannya sumber mata air dalam pembuatan sumur tersebut.⁶⁶ Adapun sumber hukum atau dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".
(Q.S *Yusuf* (12) : 72)

⁶⁵ Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2000), h.126-129.

⁶⁶ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 149-150

Dari penjelasan surat Yusuf ayat 72 jelas terlihat bahwa pekerjaan di sini dinilai dari hasil kerja yang dilakukan, yaitu mengembalikan piala raja yang hilang. Sehingga dengan demikian, berarti pengupahan atau upah dinilai dari hasil pekerjaan, sebab apabila dia telah bekerja memperoleh piala raja tetapi ia tidak dapat menemukannya, maka ia tidak akan mendapatkan upah sama sekali.⁶⁷

Selain itu, para ulama telah bersepakat tentang kebolehan akad *ju'alah* karena diperlukan untuk mengatur suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dan tidak ada orang yang mau atau bisa membantu secara sukarela. Dan pekerjaan itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya menggunakan akad *ijarah* karena tidak jelas batas pekerjaan karena di dalam kerja borongan tidak adanya batas waktu dan sebagainya. Oleh karena itu, yang boleh dilakukannya adalah menggunakan akad *ju'alah*.⁶⁸

b. Upah Harian

Upah harian adalah upah yang diberikan berdasarkan waktu, yang mana biasanya mereka bekerja dari pagi sampai sore. Biasanya upah harian lebih banyak digunakan pada bidang pertanian, yaitu buruh tani.

c. Upah Bulanan

Upah bulanan merupakan suatu imbalan atau kompensasi yang diberikan kepada seseorang karena telah bekerja yang diberikan di setiap bulannya.

5. Sifat Upah-Mengupah

Al-ujrah menurut Hanafiah merupakan akad yang lazim (mengikat), yang boleh di *fasakh* apabila ditemukan *uzur* di dalamnya seperti meninggal dunia atau gila. Sedangkan

⁶⁷ Rohman Abdur, Multi Level Marketing: Analisis Penerapan Akad *Ju'alah* Dalam Multi Level Marketing (MLM), *al-Adalah*, , Vol.13 No.2, h. 182.

⁶⁸ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 149

Jumhur Ulama menerangkan bahwa *ijarah* merupakan akad yang tidak bisa difasakh kecuali dengan alasan yang jelas yang menjadikan akad tersebut menjadi *fasakh*, seperti adanya 'aib (cacat) dan hilangnya manfaat.⁶⁹

Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda, dalam kasus salah seorang *aqid* meninggal dunia. Menurut Mazhab Hanafi apabila seseorang yang berakad meninggal dunia maka dianggap batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Berbeda dengan Jumhur Ulama yang membolehkannya bahwa, akad *ijarah* tidak menjadi batal karena manfaat termasuk sebagai harta, sehingga dapat diwariskan kepada ahli warisnya.

6. Sistem Pembayaran Upah

Jika itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara langsung sesuai dengan manfaat yang diterima. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.

Jika *musta'jir*. Ia berhak menerima baayarnya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaanya.⁷⁰

Upah berhak diterima dengan syarat:

- a. Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- b. Mendapat manfaat, jika *Ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- c. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 328.

⁷⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, h.236.

- d. Mempercepat pembayaran sewa sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
- b. Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat yang diIjarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

Menurut mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkannya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.

Upah menurut profesor Benham, upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasa sesuai dengan perjanjian.⁷¹

Proses penentuan upah yang islami berasal dari dua faktor: objektif dan subjektif. Objektif adalah upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Sedangkan subjektif, upah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial. Maksud pertimbangan-pertimbangan sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan tenaga kerja. Selama ini ekonomi konvensional berpendapat, upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Namun ada sisi kemanusiaan yang harus diperhatikan pula.

Upah mengupah atau *Ijarah 'al-a'mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian,

⁷¹Taqyudin An,Nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya; Risalah Gusti, 1960), h.103.

membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'al-a'mal* terbagi dua yakni:⁷²

- a. *Ijarah khusus*, yaitu yang dilakukan pekerja. Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah mem beri upah. Contoh :heri mempekerjakan Agung, selama Agung bekerja ditepat Heri dengan kesepakatan yang telah ditentukan, maka Agung tidak boleh menerima pekerjaan dari orang lain selama pekerjaan Agung tersebut belum selesai, dalam arti kata lain Ijarah khusus ini mengikat seseorang agar tidak menerima pekerjaan lain sampai jangka waktu habis yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.
- b. *Ijarah musytarik*, yaitu Ijarah yang dilakukan secara bersama-sama, atau melalui kerjasama hukumnya dibolehkan krja sama dengan orang lain.

7. Berakhirnya Upah-Mengupah

Para Ulama Fiqih menyatakan bahwa akad *ujrah* akan berakhir apabila:

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahit hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan pada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
- c. Menurut Mazhab Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumbuh Ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *al- ijarah* sama dengan jual beli,

⁷²Al-faruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid 2 (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989), h.361.

yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.⁷³

d. Menurut Sayid Sabiq, berakhirnya sewa menyewa dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- 1) Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi menjadi *'ain*.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).
- 4) Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman di panen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksud untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

8. Unsur-Unsur Yang Dapat Merusak Akad Upah-Mengupah

Akad melakukan suatu pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu akad dimana kewajiban salah satu pihak adalah melakukan pekerjaan. *Ujrah* dalam hukum Islam didefinisikan sebagai suatu akad atas beban objeknya adalah manfaat dan jasa yang didalamnya tidak boleh adanya unsur-unsur yang dapat merusak kontrak tersebut yaitu:

⁷³ Suwardi K. Lubis dan Farid Wajdi, dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*(Jakarta Timur: Sinar Grafika 2014).h. 43.

a. Keterpaksaan

Bila ada keterpaksaan dari salah satu pihak tentu saja ini sama saja dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil dan melukai salah satu pihak.

b. Adanya unsur penipuan, penyesatan dengan sengaja oleh salah satu pihak terhadap pihak lain dengan memberikan informasi secara palsu dan tidak memberikan keterangan secara jelas.

c. Penyamaran cacat objek, penyamaran ini dimaksudkan agar salah satu pihak tidak mengetahui salah satu kekurangan dari objek tersebut.

d. Tidak adanya keseimbangan objek dan harga.⁷⁴

Dalam hubungan interaksi antar sesama manusia, haruslah berjalan dengan baik yang tunduk kepada syari'ah Islam atau yang keluar dari ketentuan kepadanya yang tidak terbatas.

Adapun transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam antara lain:

- a. Barang yang menjadi objek perniagaan adalah barang yang
- b. diharamkan dan dilarang dalam Islam.
- c. Adanya unsur riba dalam transaksi tersebut.
- d. Adanya unsur ketidakjelasan (*Gharar*).
- e. Adanya unsur penipuan, kecurangan.

⁷⁴ Mohammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), h.324

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadits

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Diponegoro, 2006)

Ahmad Musthofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Cet I (Semarang: CV Toha Putra, 1984)

Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram (Kitab Hadits Praktis dan Lengkap Fikih, Akhlak, dan Keutamaan Amal)*, (Bandung: Sygma Publishing, 2011)

Allaudin al-kasanih, *badai' ash-Shanas fi tarib Asy-syarai*, juz VI, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1971)

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Cet ke 2 (Pesan, Kesan, dan Kekeragaman AL-Quran)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009)

Tim Tasbih Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: Versia Yogya Grafika, 1995)

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008)

Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, Dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Riyadh: Madrul Wathan Lin-Nasyr, 2004)

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007)

Adi Warman Karin, Bank Islam: *Analisa Fiqh dan keuangan*, (Jakarta, IIIT, 2002)

Ahmad Sabiq Abu Yusuf, *Kaidah Fiqh*, (Gresik: Pustaka Al-Furqan, 2016)

- Ahmad WardiMuslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual. Ed 1, Cet 1*, (Jakarta: PT. GrafindoPersada, 2002)
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, (Jakarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya), 2010.
- Kamal Muchtar, *Ushul Fiqih*, Jilid 1,(Yogyakarta:PT Dana Bhakti Wakaf 1995)
- M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Cetakan Ke III, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002)
- M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Mushthafa Ahmad az-Zarqa', *al-Fiqh al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm*, jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968)
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017)
- Sohari Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: PT Raja Grafindo Persada,1979)
- Sohari Sahari, *Fiqh Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Syafe'I Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: PustakaSetia, 2000)
- Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008)
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2011)

C. Hukum dan Undang-Undang

Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*,. (Yogyakarta: UII Press 2009).

Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016)

M. Hasbi Assidqy, *falsapah hukum islam*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002)

D. Metode Penelitian

Burhan Bungain, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018)

Newman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta, 2013)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R D* (Bandung: Alfabeta, 2018)

E. Lain-Lain

Abdul Manan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997)

Al-faruzRahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989)

Arif, *Farmasetika*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007)

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet.4, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011)

Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahidjuz 2*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga)

Jamal Ma'mun Asmani, *Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Pendidikan* (Yogyakarta: Diva Press, 2011)

Mohammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta :Zikrul Hakim, 2010)

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, Terj. Redaksi Al-Azhar Press,(Bogor:Al-Azhar Press,2010)

Ria Astuti, *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS)".*(Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018)

Taqyudin An'Nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya; Risalah Gusti, 1960)

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (2020)

Sumber lainnya

Berbagi Ilmu” (On-line). Tersedia di:
<https://rianamuslikhah.blogspot.com/2015/02/makalah-upah-dalam-islam.html/>

Pengusaha Muslim, On-line” tersedia di:
<https://pengusahamuslim.com/3577-tenaga-kerja-dan-upah-dalam-1823.html>

Praktik” (On-line) tersedia di: <https://kbbi.web.id/praktik>